

**POLA PENYELESAIAN SENGKETA *PAGANG GADAI*
TANAH *PUSAKO DI NAGARI NAN XX*, KECAMATAN
LUBUK BEGALUNG, KOTA PADANG**

SKRIPSI



**Pembimbing I : Dra. Ermayanti, M.Si
Pembimbing II : Drs. Edi Indrizal, M.Si**

**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

INTI SARI

Siti Syawali Alfika. 2010822038. Pola Penyelesaian Sengketa *Pagang Gadai Tanah Pusako di Nagari Nan XX*, Kecamatan Lubuk Begalung. Skripsi S1. Pembimbing I, Dra. Ermayanti, Pembimbing II M.Si, Drs. Edi Indrizal M.Si. Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, 2025.

Praktik *Pagang Gadai* tanah *pusako di Minangkabau*, termasuk di Nagari Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, merupakan tradisi ekonomi yang masih bertahan hingga kini meskipun lembaga keuangan modern telah berkembang. Praktik ini berfungsi sebagai solusi ekonomi sekaligus merefleksikan nilai sosial budaya masyarakat, namun dalam perjalanannya sering menimbulkan sengketa akibat ketidakjelasan jangka waktu, perbedaan penafsiran antar ahli waris, hingga klaim kepemilikan antar kaum. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kerentanan dalam praktik *Pagang Gadai* yang diwariskan lintas generasi, di mana tidak sedikit kasus yang berlangsung puluhan tahun tanpa penyelesaian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pola penyelesaian sengketa tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan sistem hukum adat dan dinamika sosial masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran 3 kasus sengketa *Pagang Gadai* tanah di Nagari Nan XX yang telah terselesaikan, dan menganalisis pola penyelesaian 3 kasus sengketa *Pagang Gadai* tanah di Nagari Nan XX yang telah terselesaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Nan XX. Pemilihan data menggunakan *Purposive Sampling*, dengan teknik pengumpulan data yaitu, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen mendalam dengan Pihak yang bersengketa, Ninik mamak, penghulu, tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa *Pagang Gadai* tanah di Nagari Nan XX umumnya dilakukan melalui proses negosiasi antar pihak, mediasi adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan jika tidak berhasil baru ditempuh jalur hukum formal. Mekanisme ini mencerminkan adanya pluralisme hukum di mana hukum adat lebih dominan dipakai, sementara hukum formal menjadi pilihan terakhir. Faktor yang mendukung penyelesaian antara lain itikad baik dari pihak penggadai dalam menebus meskipun belum mampu untuk menebus, sedangkan faktor penghambat meliputi kesulitannya pihak dalam menebus sesuai jatuh tempo masa gadai, adanya keinginan pihak untuk menguasai objek gadai, terdapat provokator dalam penyelesaiannya

Kata Kunci: *Pagang Gadai*, Sengketa, Penyelesaian, Pluralisme Hukum

ABSTRACT

Siti Syawali Alfika. 2010822038. Patterns of Dispute Resolution in Land Pawning (*Pagang Gadai*) in Nagari Nan XX, Lubuk Begalung District. Undergraduate Thesis. Supervisor I, Dra. Ermayanti; Supervisor II, Drs. Edi Indrizal, M.Si. Department of Anthropology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Andalas, Padang, 2025.

The practice of land pawning (*Pagang Gadai*) of communal land (*tanah pusako*) in Minangkabau, including in Nagari Nan XX, Lubuk Begalung District, remains a resilient economic tradition despite the growth of modern financial institutions. This practice serves as an economic solution while also reflecting the socio-cultural values of the community. However, it often leads to disputes due to unclear timeframes, differing interpretations among heirs, and ownership claims between lineages. Such phenomena reveal vulnerabilities within the *Pagang Gadai* system that has been inherited across generations, with many cases lasting for decades without resolution. This condition highlights that dispute resolution patterns involve not only economic aspects but are also closely tied to customary law and social dynamics.

This study aims to describe three resolved cases of *Pagang Gadai* land disputes in Nagari Nan XX and to analyze the resolution patterns employed. The research method used is a case study with a descriptive qualitative approach. The fieldwork was conducted in Nagari Nan XX. Data were collected through purposive sampling, using in-depth interviews, observation, and document analysis involving disputing parties, *ninik mamak* (maternal uncles), *penghulu* (clan leaders), and community figures.

The findings indicate that dispute resolution in *Pagang Gadai* cases in Nagari Nan XX is generally carried out through direct negotiation between parties, followed by customary mediation facilitated by the Kerapatan Adat Nagari (KAN), and only if these fail, through formal legal channels. This mechanism reflects the coexistence of plural legal systems, with customary law being more dominant while formal law serves as the last resort. Supporting factors include the goodwill of the pawner to redeem the land even when financially constrained, while inhibiting factors involve the difficulty of redeeming within the agreed period, one party's intention to control the pawned land, and the presence of provocateurs during the process.

Keywords: *Pagang Gadai*, Dispute, Resolution, Legal Pluralism